



Radar Bali

10 Saksi Hibah Ternak Diperiksa

PADA bagian lain, setelah sempat diundur, akhirnya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada kasus korupsi hibah atau bansos untuk enam kelompok ternak sapi, ternak babi, dan ternak ayam di Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal dilakukan pada Jumat (24/4) pagi sampai selesai.

Sesuai dengan yang diberitakan sebelumnya, bahwa akan ada 10 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik. Satu per satu saksi dimintai keterangan di Ruang Kemitraan III Sat Reskrim Polres Badung. Seluruh saksi yang hadir menggunakan

pakaian adat Bali tersebut merupakan sampel acak dari penerima dana hibah atau bansos untuk enam kelompok ternak. Salah satu saksi yang mengaku sebagai anggota kelompok ternak tersebut, I Gusti Made Keren, 76, mengatakan tidak tahu menau saat ditanya tentang dugaan kasus korupsi tersebut. Kanit Tipikor Polres Badung Ipda Bagja Muharam mengatakan sampai saat ini total saksi diperiksa sudah lebih dari 30 orang. "Selanjutnya hasil pemeriksaan tadi akan dikoordinasikan untuk pemeriksaan berikutnya," ujarnya. (ras/han)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 24



Radar Bali

Dewan Segera Panggil Disbud

Dugaan Penyimpangan Dana Tirta Yatra

MANGUPURA - Tidak ingin tertinggal dalam pengusutan dugaan penyelewengan dana hibah tirta yatra kepada PHDI Badung versi Nyoman Sukada, Komisi IV DPRD Badung yang membidangi adat dan budaya ikut turun tangan. Ketua Komisi IV Nyoman Sutrisno menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan berencana memanggil Dinas Kebudayaan (Disbud) sebagai instansi yang menyalurkan dana hibah. Selain meminta penjelasan dana hibah, pemanggilan juga meminta kejelasan status PHDI Badung versi Nyoman Sukada.

Pasalnya, selama ini PHDI di Badung terjadi dualisme kepemimpinan.

Selain PHDI Badung versi Nyoman Sukada, juga ada PHDI Badung pimpinan I Wayan Pasek Sukayasa. Belakangan diketahui bahwa PHDI pimpinan I Wayan Sukayasa justru yang mendapat pengakuan struktural dari PHDI pusat pimpinan Sang Nyoman Swisma serta diakui PHDI Bali pimpinan IG Ngurah Sudiana.

"Ini kan lucu yang secara struktural dari pusat tidak dikasi (hibah) tetapi PHDI yang tidak masuk struktural pusat malah dikasi. Pak Bupati kan biasanya taat pada aturan kenapa terhadap PHDI tidak (diberlakukan) seperti itu," sindir Sutrisno kemarin (23/4). Pihaknya pun mendorong agar pihak Kejari memproses masalah tersebut hingga tuntas sehingga tidak adalagi pertanyaan yang aneh-aneh terkait dana hibah yang diperuntukkan untuk lembaga umat. (san/han)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 24



Radar Bali

Kejati Temukan PMH di PDAM

Tinggal Hitung Kerugian Negara

DENPASAR - Masih ingat dengan dugaan korupsi di PDAM Karangasem? Sekitar dua pekan lalu kejati memanggil orang-orang PDAM secara bergilir. Informasi terakhir tim jaksa sudah menemukan bahwa ada penyimpangan, atau perbuatan melawan hukum (PMH) di PDAM Karangasem. Saat ini tinggal menunggu kerugian yang sedang diaudit oleh BPKP.

Informasi yang dirangkum koran ini, ada laporan masyarakat masuk ke Kejati Bali soal dugaan penyimpangan di PDAM Karangasem, terkait dengan pengadaan dan dugaan-dugaan permainan. Setelah Kejati melakukan puldata (pengumpulan data) dan meminta keterangan dari beberapa saksi, akhirnya ditemukan indikasi permainan. "Setelah itu naik ke penyelidikan, akhirnya memang ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan," imbuhnya.

Dia juga mengatakan sudah dipastikan ada PMH dalam beberapa proyek di Karangasem. Saat ini, yang dialami adalah pengadaan pipa dan pompa. Bahkan, kejati telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga rekanan untuk menggali keterangan

► *Baca Kejati... Hal 31*



Memang benar sudah ada PMH (perbuatan melawan hukum) dalam kasus dugaan korupsi di PDAM Karangasem. Artinya dugaan korupsinya sudah ditemukan."

Ashari Kurniawan

Kasipenkum Kejati Bali

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 21



Radar Bali

Dalami Pengadaan

Pipa dan Pompa

■ KEJATI...

Sambungan dari hal 21

"Tiga rekanan terkait pipa dan pompa, sudah didapatkan keterangan. Itu kita lakukan saat pemeriksaan terakhir beberapa hari lalu," lanjut sumber lain.

Setelah ini didapatkan, kita menemukan PMH. Akhirnya, tim jaksa yang dipimpin oleh Rochida, Agus Jehamad, Raka

Arimbawa, dan lainnya ini akhirnya meminta BPKP untuk menghitung kerugian negara.

Dikonfirmasi ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan, awalnya mengatakan malah belum dengar sudah ada PMH dalam kasus PDAM Karangasem. "Coba saya cek dulu, ya," ungkapnya. Setelah menghubungi pihak jaksa yang tergabung dalam tim, akhirnya Ashari memberikan

penjelasan. "Memang benar sudah ada PMH dalam kasus dugaan korupsi di PDAM Karangasem. Artinya dugaan korupsinya sudah ditemukan," ungkap Ashari.

Dia mengatakan saat ini tim sedang menunggu hasil penghitungan dari BPKP. Untuk mengetahui berapa jumlah kerugiannya, kemudian baru bisa nanti mengambil langkah-langkah selanjutnya. "Semen-

tara yang dialami untuk pengadaan pipa dan lain-lain," pungkas Ashari.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini berawal dari laporan masyarakat atas dugaan-dugaan permainan Dirut PDAM Karangasem Baktiyasa. Bahkan, tim sudah sempat melakukan penggeledahan ke PDAM Karangasem. Namun, pihak PDAM Karangasem selalu berkelit tidak ada. (art/yes)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 31



Lagi, Jaksa Panggil Ayu Sri

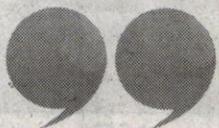
Dalam Kasus Korupsi Wayan Candra

DENPASAR - Dua kali mangkir, saksi kunci kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Klungkung, Wayan Candra yang akan dihadirkan diluar berkas kembali dipanggil. Dia adalah saksi I Gusti Ayu Sri Wahyuni. Saksi ini menjadi heboh lantaran sempat dijadikan tersangka, namun tanpa SP3 malah kembali jadi saksi. Janggalnya setelah pihak Jaksa membantah, akhirnya pengacara Ayu Sri yaitu Nyoman Wisnu meralat dengan alasan kasihan dengan Jaksa. Kemarin (25/4) pihak Jaksa memastikan sudah kembali memanggil.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Azman Tanjung, surat pemanggilan kembali Ayu sudah dikirim. Dia mengatakan, informasi terakhir Ayu Sri sudah melahirkan. Sebelumnya alasan tidak datang lantaran melahirkan. "Kami sudah panggil lagi, untuk bisa datang dalam sidang dengan terdakwa Candra selanjutnya," ungkap Azman Tanjung. "Sebelumnya alasannya akan melahirkan, informasi terakhir sudah lahir katanya anaknya. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, kami tetap akan panggil," lanjut Jaksa Koordinator di Kejati Bali ini.

Sebagaimana berita sebelumnya, sidang kasus korupsi mantan Bupati Klungkung Wayan Candra saksi yang sebelumnya sempat jadi tersangka Gusti Ayu Sri Wahyuni kembali man-



Kami sudah panggil lagi, untuk bisa datang dalam sidang dengan terdakwa Candra selanjutnya."

AZMAN TANJUNG

Jaksa Penuntut Umum

gkir. Jaksa berjanji akan memanggil. Namun hakim langsung mengingatkan, agar jangan hanya dipanggil, tapi agar dihadirkan.

Sri Wahyuni adalah saksi kunci atas

keberadaan property milik Candra di Agung Podomoro, Jakarta. Sri Wahyuni sempat disebut oleh pengacara Nyoman Wisnu jadi tersangka namun dirubah menjadi saksi, tanpa SP3. Kondisi ini dibantah Jaksa, namun akhirnya pengacaranya meralat dengan alasan kasihan dengan Jaksa.

Nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. "Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal - usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218," tegas Jaksa. (art/rid)

Edisi : Sabtu, 25 April 2015

Hal : 24